

**PENGAMANAN BARANG MILIK NEGARA  
MELALUI ASURANSI PADA KEMENTERIAN LINGKUNGAN  
HIDUP DAN KEHUTANAN**

Disusun Oleh:

NAMA : BUYUNG WIDYATAMA  
NPM : 2143021072  
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK  
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA  
KONSENTRASI : MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA

Tesis diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar  
Magister Terapan Administrasi Publik (M.Tr.A.P.)



**POLITEKNIK  
STIA LAN  
J A K A R T A**

**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA  
PROGRAM MAGISTER TERAPAN  
TAHUN 2024**

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh,

Salam sejahtera untuk kita semua,

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat melaksanakan penelitian sampai dengan penulisan tesis ini selesai.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta Prof. Dr. Nurliah Nurdin, MA. atas kesempatan penulis dalam menuntut Ilmu Administrasi Negara di Kampus Politeknik STIA LAN Jakarta. Ucapan terima kasih penulis sampaikan pula kepada Kepala Biro Umum dan Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan serta izin kepada penulis untuk dapat melaksanakan penelitian dalam rangka penulisan tesis ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada rekan kerja, teman seangkatan kuliah Semester II Tahun 2021 serta semua Dosen dan Sivitas Politeknik STIA LAN Jakarta yang telah memberikan ilmu, arahan dan dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Dosen Pembimbing Ibu Dr. Neneng Sri Rahayu, M.Si. dan Bapak Dr. R. N. Afsdy Saksono, M.Sc. atas dukungan, arahan dan bimbingannya sehingga penulisan tesis ini dapat selesai. Tidak lupa pula ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Orang Tua (Bapak Saimin dan Ibu Sri Hartati, Bapak Rakiban dan Ibu Rindho Sulistyowati), Istri tercinta (Dianti Artiati) serta anak-anak tersayang (Calisa Rafiqah Zulfa Azka dan Emyr Ibrahim Wahid Zayan) yang telah memberikan dukungan serta doa sehingga pelaksanaan penelitian sampai dengan penulisan tesis sebagai tugas akhir dapat terlaksana dengan baik. Tesis yang penulis susun masih jauh dari sempurna, untuk itu mohon saran dan masukkan yang membangun.

Demikian yang dapat penulis sampaikan dan semoga laporan penulisan tesis ini dapat memberikan manfaat kepada para pembaca.

Aamiin ya robal'alamiin.

Wassalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Jakarta, November 2024

Penulis,

Buyung Widyatama



**POLITEKNIK  
STIA LAN  
J A K A R T A**

## ABSTRAK

### **Pengamanan Barang Milik Negara Melalui Asuransi Pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan**

Buyung Widyatama<sup>1</sup>, Neneng Sri Rahayu<sup>2</sup>, R.N. Afsdy Saksono<sup>3</sup>  
[widyatamabuyung@gmail.com](mailto:widyatamabuyung@gmail.com)<sup>1</sup>, [neneng.rdwn@gmail.com](mailto:neneng.rdwn@gmail.com)<sup>2</sup>, [afsdys@gmail.com](mailto:afsdys@gmail.com)<sup>3</sup>  
Politeknik STIA LAN Jakarta<sup>1,2,3</sup>

Penelitian bertujuan menggali faktor-faktor pengamanan BMN gedung dan bangunan melalui Asuransi BMN pada KLHK serta merumuskan model pengamanan BMN gedung dan bangunan melalui Asuransi BMN pada KLHK. Metode menggunakan studi kasus (*case study*) melalui pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui telaah dokumen dan wawancara. Faktor kelembagaan, budaya, keterjangkauan, kesadaran dan pengetahuan, serta proses pengasuransian dan kepercayaan menjadi faktor yang menyebabkan rendahnya pengamanan BMN melalui asuransi pada KLHK. Faktor kelembagaan menunjukkan telah dimilikinya Surat Kepala Biro Umum perihal Pengasuransian BMN Tahun Anggaran 2021. Faktor budaya menggambarkan walaupun berada pada Indeks Risiko Bencana kategori tinggi dan pernah terjadi bencana alam belum menjadi pemicu pengasuransian BMN. Faktor keterjangkauan menunjukkan KLHK sudah menganggarkan biaya pengasuransian BMN periode Tahun 2022 dan 2023. Faktor kesadaran dan pengetahuan menunjukkan belum sepenuhnya Satuan Kerja lingkup KLHK memahami Asuransi BMN serta kurangnya kesadaran pentingnya asuransi bencana. Faktor proses pengasuransian dan kepercayaan menunjukkan sosialisasi Asuransi BMN dari Perusahaan Asuransi Jasindo belum sampai ke tingkat tapak. Rekomendasi pengamanan BMN melalui Asuransi BMN pada KLHK adalah membangun komitmen bersama, membuat kembali surat pengasuransian BMN, memasukkan Asuransi BMN dalam PKPT, mengidentifikasi potensi atau kerawanan bencana serta merekapitulasi dan mendokumentasi riwayat bencana, membuat saluran pelaporan dampak bencana yang dialami, membuat sketsa perhitungan Premi Asuransi BMN, sosialisasi Asuransi BMN bersama BKF Kementerian Keuangan, BNPB dan Perusahaan Asuransi Jasindo, serta melakukan kegiatan diklat Asuransi BMN.

Kata kunci: Pengamanan; Barang Milik Negara (BMN); Asuransi Barang Milik Negara (Asuransi BMN).

POLITEKNIK  
STIA LAN  
JAKARTA

## ABSTRACT

### **SECURITY OF STATE PROPERTY THROUGH INSURANCE AT THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTRY**

Buyung Widyatama<sup>1</sup>, Neneng Sri Rahayu<sup>2</sup>, R.N. Afsdy Saksono<sup>3</sup>  
[widyatamabuyung@gmail.com](mailto:widyatamabuyung@gmail.com)<sup>1</sup>, [neneng.rdwn@gmail.com](mailto:neneng.rdwn@gmail.com)<sup>2</sup>, [afsdys@gmail.com](mailto:afsdys@gmail.com)<sup>3</sup>  
Politeknik STIA LAN Jakarta<sup>1,2,3</sup>

*The research aims to explore the factors of building BMN security through BMN insurance at KLHK and formulate a model of building BMN security through BMN insurance at KLHK. The method uses a case study (case study) through a qualitative approach. Data obtained through document analysis and interviews. Institutional factors, culture, affordability, awareness and knowledge, as well as insurance and trust processes are factors that cause low security of BMN through insurance at KLHK. Institutional factors indicate that he has a letter from the head of the General Bureau regarding BMN insurance for the 2021 fiscal year. Cultural factors illustrate that although it is in the high category disaster risk index and natural disasters have not been a trigger for BMN insurance. The affordability factor shows that KLHK has budgeted the cost of BMN insurance for the 2022 and 2023 periods. Awareness and knowledge factors indicate that the working units within the KLHK have not fully understood BMN insurance and lack of awareness of the importance of disaster insurance. Insurance process and trust factors indicate BMN insurance socialization from Jasindo insurance company has not reached the footprint level. The recommendations for securing BMN through BMN insurance at KLHK are to build a joint commitment, re-create BMN insurance letters, include BMN insurance in PKPT, identify potential or disaster vulnerability and recapitulate and document disaster history, create disaster impact reporting channels, sketch BMN insurance premium calculations, socialize BMN insurance with BKF Ministry of Finance, BNPB and Jasindo insurance companies, and conduct BMN insurance training activities.*

**Keywords:** Security; State Property (BMN); State Property Insurance (BMN insurance).

POLITEKNIK  
STIA LAN  
JAKARTA

## DAFTAR ISI

### BAB I PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	13
C. Rumusan Permasalahan .....	13
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	14

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu.....	15
B. Tinjauan Kebijakan.....	25
1) Keuangan Negara .....	25
a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara .....	25
b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.....	25
2) Manajemen Aset.....	26
a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.....	26
b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014.....	28
3) Asuransi Barang Milik Negara .....	29
a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.....	29
b) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 97/PMK 06/2019 Tentang Pengasuransian Barang Milik Negara.....	29
C. Tinjauan Teoritis.....	35
1) Administrasi Publik .....	35
2) Keuangan Negara .....	38
3) Manajemen Aset.....	41
4) Pengamanan Aset .....	50
5) Asuransi Barang Milik Negara .....	51
6) Faktor-Faktor Pengamanan Barang Milik Negara Melalui Asuransi .....	53

D. Operasionalisasi Konsep.....	59
E. Kerangka Berpikir.....	62

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

A. Metode Penelitian.....	64
B. Teknik Pengumpulan Data .....	64
1) Metode Pengumpulan Data .....	64
a) Telaah Dokumen.....	64
b) Wawancara.....	66
2) Sumber Data .....	68
a) Data Primer.....	68
b) Data Sekunder .....	68
C. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	68
1) Teknik Analisis Data .....	68
a) Pengumpulan Data .....	69
b) Reduksi Data .....	69
c) Penyajian Data.....	69
d) Penarikan Kesimpulan/Verifikasi .....	69
2) Validitas Data .....	69
D. Instrumen Penelitian.....	70
1) Pedoman Wawancara .....	70
2) Pedoman Telaah Dokumen .....	70
3) Alat Tulis.....	71
4) Alat Perekam.....	71

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.....	72
B. Penyajian Data dan Analisis Data.....	76
1) Faktor Kelembagaan .....	76
2) Faktor Budaya .....	84
3) Faktor Keterjangkauan .....	86

4) Faktor Kesadaran dan Pengetahuan .....	93
5) Faktor Pengasuransian dan Kepercayaan .....	99
C. Model Pengamanan BMN Gedung dan Bangunan Melalui Asuransi BMN di KLHK.....	101
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	109
B. Saran .....	110
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	112
<b>LAMPIRAN</b> .....	120



**POLITEKNIK  
STIA LAN  
J A K A R T A**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Neraca Aset Tetap Pemerintah Pusat Tahun 2022 .....	3
Tabel 1.2 Daftar Kementerian/Lembaga Telah Mengasuransikan BMN Tahun 2019 Sampai Dengan Tahun 2021 .....	8
Tabel 1.3 Sebaran Satuan Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan .....	10
Tabel 1.4 Sebaran Satuan Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Berdasarkan Kelas Risiko Bencana .....	10
Tabel 1.5 Rincian Objek Pertanggungansian Polis Asuransi BMN Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022 dan 2023.....	11
Tabel 1.6 Neraca Aset Tetap Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021 dan 2022 .....	12
Tabel 1.7 Rincian Gedung dan Bangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021 dan 2022 .....	12
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	17
Tabel 3.1 Daftar <i>Key Informant</i> .....	67



POLITEKNIK  
STIA LAN  
J A K A R T A

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Sebaran Jalur Gunung Berapi Asia-Pasifik ( <i>ring of fire</i> ) ...	4
Gambar 2.1	Siklus Alur Aset.....	44
Gambar 2.2	Alur Manajemen Aset.....	46
Gambar 2.3	Rangkaian Pengelolaan Barang Milik Daerah .....	49
Gambar 2.4	Kerangka Berpikir .....	62
Gambar 3.1	Komponen Analisis Data Model Miles dan Huberman.....	68
Gambar 4.1	Struktur Organisasi KLHK .....	75
Gambar 4.2	Polis Asuransi BMN Setjen KLHK Tahun 2023 .....	76
Gambar 4.3	Surat Kepala Biro Umum Mengenai Pengasuransian BMN.....	77
Gambar 4.4	Surat Sekretaris Direktorat Jenderal PDASHL Mengenai Pengasuransian BMN .....	78
Gambar 4.5	Surat Kepala BPDASHL Pemali Jratun Mengenai Pengasuransian BMN .....	79
Gambar 4.6	Prediksi Premi Asuransi BMN KLHK .....	88
Gambar 4.7	Laporan Beban Asuransi BMN Pada Laporan Keuangan KLHK Tahun Anggaran 2022 (Audited).....	91
Gambar 4.8	Rincian Kertas Kerja Belanja Asuransi Gedung dan Bangunan Setjen KLHK TA 2022 .....	91
Gambar 4.9	Rincian Kertas Kerja Belanja Asuransi Gedung dan Bangunan Setjen KLHK TA 2023 .....	92
Gambar 4.10	Rekapitulasi Data BMN Terdampak Bencana Alam .....	95
Gambar 4.11	Tahapan Pengasuransian BMN Sebelumnya.....	102
Gambar 4.12	Model Pengamanan BMN Melalui Asuransi BMN dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi.....	103

POLITEKNIK  
STIA LAN  
J A K A R T A

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Permohonan Ijin Penelitian .....	121
Lampiran 2 Surat Konfirmasi Permohonan Ijin Penelitian .....	122
Lampiran 3 Surat Keterangan Telah Selesai Melakukan Penelitian .....	123
Lampiran 4 Panduan Wawancara .....	124
Lampiran 5 Transkrip Wawancara .....	127
Lampiran 6 Hasil Telaah Dokumen .....	152
Lampiran 7 Riwayat Hidup .....	164



**POLITEKNIK  
STIA LAN  
J A K A R T A**



# BAB I

## PERMASALAHAN PENELITIAN

### A. Latar Belakang

Perubahan paradigma administrasi publik bergerak dinamis, awal kemunculannya dikenal sebagai *Old Public Administration (OPA)* yang menutup keterlibatan masyarakat terhadap pelayanan publik, pemerintahan yang birokratis serta kaku sehingga menyebabkan masyarakat tidak puas terhadap layanan publik. Alasan tersebut mendorong lahirnya *New Public Management (NPM)* yang merubah pelayanan publik menjadi lebih kompetitif dengan swasta, menghilangkan patologi birokrasi, responsif, dan alternatif layanan lebih luas sehingga mengurangi monopoli pemerintah. Dalam perkembangannya, NPM dikritik karena melihat masyarakat hanya sebagai *customer* semata, sehingga nilai-nilai demokratis tidak ditegakkan dalam pelayanan publiknya yang pada akhirnya paradigma administrasi publik berubah menjadi *New Public Service (NPS)*, dimana publik diikutsertakan dalam penyediaan layanan yang diharapkan disediakan oleh pemerintah (Mulyadi, D. et.al. 2016). Paradigma administrasi publik yang berkembang sampai dengan sekarang yakni *Governance* yang merupakan sistem nilai, kelembangan, dan kebijakan dimana masalah ekonomi, sosial, dan politik dikelola dengan keterlibatan masyarakat, sektor swasta, dan pemerintah. Pemerintah bertanggungjawab akan terciptanya lingkungan politik dan hukum yang kondusif, pihak swasta berperan menyediakan lapangan pekerjaan, sedangkan masyarakat berinteraksi sosial serta berpolitik secara sehat (Keban, Y.T., 2014, h.38).

Sejalan dengan paradigma administrasi publik yakni *Governance*, guna menjamin keberlanjutan eksistensi pelayanan publik, pemerintah berupaya mengamankan aset dari risiko bencana alam melalui skema Asuransi Barang Milik Negara (Asuransi BMN). Pemerintah bekerjasama dengan pihak swasta yakni Konsorsium Asuransi BMN (KABMN) sebagai pihak penjamin yang merupakan bagian dari Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI). KABMN beranggotakan lima puluh enam perusahaan asuransi dan reasuransi yang diketuai oleh PT. Jasa Asuransi Indonesia/Jasindo ('Aliimah, 2020, h.6). Dengan adanya Asuransi BMN masyarakat mendapatkan kepastian akan keberlanjutan layanan publik.

Salah satu negara yang sudah menerapkan asuransi sebagai wujud manajemen risiko terhadap bencana adalah Australia. Kesenjangan ketersediaan dana dengan kebutuhan untuk membangun kembali fasilitas publik akibat bencana yang mempunyai rentang jauh merupakan salah satu pengungkit pemerintah Australia untuk mengembangkan asuransi. Pemerintah Australia mendirikan *Comcover* dengan tujuan untuk meningkatkan praktik manajemen risiko dan melindungi entitas pemerintah dari kerugian yang bersumber dari dana asuransi. *Comcover* merupakan pengelola dana mandiri di bawah pemerintah, bukan perusahaan swasta, sehingga memberikan keuntungan dengan cakupan proteksi yang lebih luas serta dapat difasilitasi melalui pendekatan sektor publik. Hasil pembayaran premi disimpan pada rekening *Comcover* dan tidak diinvestasikan. Pendapatan diperoleh dari suku bunga simpanan. Besaran premi yang dibayarkan disesuaikan dengan profil organisasi dan risikonya, serta penghitungan premi didasarkan pada estimasi penggantian aset, bukan berdasar nilai buku aset tersebut (Melli dan Yudi, 2014). Menghitung premi berdasarkan nilai buku aset tidak serta merta mencakup seluruh resiko, biasanya nilai buku lebih rendah dibanding dengan biaya penggantian, nilai buku didasarkan pada umur dan kondisi aset. Sehingga menjadi penting untuk menerka nilai pasar atau menghitung estimasi penggantian aset yang dimiliki oleh setiap entitas pemerintah. Informasi mengenai nilai pasar atas aset bermanfaat dalam mengetahui eksposur keuangan jika bencana menimpa aset tersebut, hal tersebut telah dilakukan oleh Kepolisian Selandia Baru dalam menentukan besaran premi asuransi asetnya (Controller and Auditor General, 2013).

Pembahasan di tingkat regional mengenai strategi pembiayaan dan asuransi bencana telah dilakukan, salah satunya dengan terbentuknya *Southeast Asia Disaster Risk Insurance Facility* (SEADRIF). SEADRIF merupakan kerjasama negara-negara ASEAN+3 (ASEAN, Jepang, Korea, dan RRT) dengan fokus menyediakan dan memfasilitasi risiko bencana melalui asuransi untuk negara-negara ASEAN. SEADRIF membentuk kelompok kerja teknis untuk mengembangkan skema asuransi banjir dan skema asuransi aset publik atau Barang Milik Negara (BMN). Indonesia tergabung dalam kelompok kerja pengembangan skema asuransi aset publik atau BMN bersama-sama dengan negara Filipina (Badan Kebijakan Fiskal/BKF).

Sejalan dengan praktik yang telah dilakukan pemerintah Australia dalam mitigasi risiko bencana, serta wujud keterlibatan dalam kelompok kerja SEADRIF, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan telah mengembangkan skema Pembiayaan dan Asuransi Risiko Bencana (PARB) atau *Disaster Risk Financing and Insurance* (DRFI). Wujud dari skema pengembangan PARB, Kementerian Keuangan mengeluarkan paket peraturan mengenai Asuransi BMN melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.247/PMK.06/2016 dan PMK No.97/PMK.06/2019.

Meningkatnya layanan terhadap masyarakat menyebabkan ragam dan nilai BMN semakin meningkat pula, tentu hal tersebut berkorelasi dengan pengamanan dan pemeliharaan guna mempertahankan keutuhan dan keberadaan BMN itu sendiri dalam menjamin keberlangsungan pelayanan publik. Tabel di bawah ini menggambarkan meningkatnya nilai BMN dari Tahun 2021 sampai 2022 khususnya aset tetap.

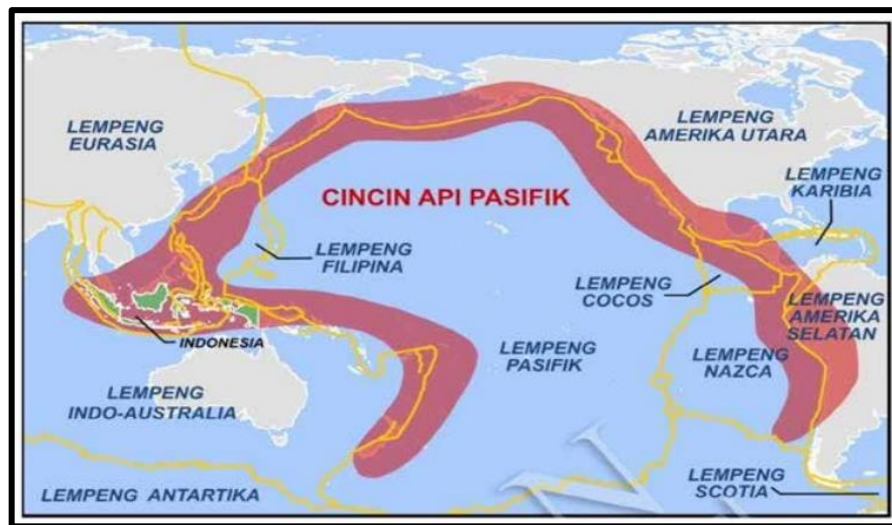
**Tabel 1.1**  
**Neraca Aset Tetap Pemerintah Pusat Tahun 2022**

Uraian	Catatan	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
<b>Aset Tetap</b>	<b>D.2.1.3</b>		
Tanah	D.2.1.3.1	4.417.293.824.468.955	4.541.798.614.039.399
Peralatan dan Mesin	D.2.1.3.2	860.530.886.280.854	784.676.725.241.744
Gedung dan Bangunan	D.2.1.3.3	448.605.823.943.973	420.147.571.518.921
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	D.2.1.3.4	1.077.469.779.946.814	1.011.741.986.090.569
Aset Tetap Lainnya	D.2.1.3.5	58.291.354.789.790	65.009.747.686.862
Konstruksi Dalam Pengerjaan	D.2.1.3.6	160.222.980.059.018	151.713.397.246.386
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		(1.186.265.525.728.671)	(1.027.967.575.561.543)
Aset Konsesi Jasa	D.2.1.3.7	951.059.329.073.009	-
Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa		(57.322.310.734.895)	-
<b>Jumlah Aset Tetap (Bruto)</b>		<b>7.973.473.978.562.413</b>	<b>6.975.088.041.823.881</b>
Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	D.2.1.3.8	(1.243.587.836.463.566)	(1.027.967.575.561.543)
<b>Jumlah Aset Tetap (Bersih)</b>		<b>6.729.886.142.098.847</b>	<b>5.947.120.466.262.338</b>

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2022 (Audited).

Faktor lain yang mendorong Pemerintah Indonesia melakukan Asuransi BMN yakni posisi geografis berada pada Cincin Api Pasifik/Lingkar Api Pasifik (*Ring of Fire*) yang berisiko terpapar bencana alam: letusan gunung berapi, gempa bumi dan tsunami. Selain bencana tersebut, sebagian besar wilayah Indonesia terpapar resiko bencana: banjir, tanah longsor, kebakaran, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan kekeringan (BKF, 2018, h.2).

**Gambar 1.1**  
**Peta Sebaran Jalur Gunung Berapi Asia-Pasifik (*ring of fire*)**



*Sumber:* Risiko Bencana Indonesia (RBI)  
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), 2023.

Letak Indonesia yang berada pada posisi *Ring of Fire* tentunya memiliki resiko yang harus dihadapi jika kejadian bencana alam: gempa bumi, gunung meletus dan tsunami terjadi secara tiba-tiba. Hal ini sejalan dengan pendapat Gina, F.V. (2022), bahwa wilayah Cincin Api Pasifik merupakan bertemunya tiga Lempeng Tektonik yakni, Pasifik, Eurasia, dan Indo-Australia. Lempeng-lempeng tersebut terus meluncur, bertabrakan atau bergerak di atas atau di bawah satu sama lainnya, pergerakan tersebut berdampak terhadap timbulnya palung laut dalam, letusan gunung berapi serta garis patahan. Risiko Bencana merupakan potensi kerugian yang diakibatkan bencana. Menurut *World Risk Index*, Indonesia pada Tahun 2022 berada pada urutan ketiga setelah Filipina dan India (Hilfft, B.E. 2022), namun pada Tahun 2023 Indonesia menggeser urutan India yang berada pada urutan kedua setelah Filipina (Hilfft, B.E. 2023).

Bencana Tahun 2018 silam yakni gempa bumi, likuifaksi, dan tsunami yang terjadi di Kota Palu Sulawesi Tengah, gempa bumi di Lombok dan Sumbawa, serta tsunami Tanjung Lesung menyebabkan kerugian ekonomi. Kerugian ekonomi gempa di Lombok dan Sumbawa mencapai Rp.17.13 Triliun, sedangkan gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Tengah mengakibatkan kerugian dan kerusakan lebih dari Rp.13.82 Triliun (Nugroho, S.P., 2018). Pada Bulan September Tahun 2018 tersebut, BMN Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)

berupa gedung kantor Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu dan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Palu Poso di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah terkena dampak gempa bumi Palu dan Donggala dengan klasifikasi kerusakan rusak sedang (Satgas Pelaksana Penanggulangan Bencana Sulawesi Tengah, 2018). Tindak lanjut hasil penilaian singkat gedung kantor yang terdampak gempa Sulawesi Tengah tersebut, satuan kerja Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu menganggarkan pembangunan gedung kantor permanen melalui Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Tahun 2019 sebesar 4.8 Miliar (Register Transaksi Harian KDP BBTN Lore Lindu, 2019), sedangkan nilai buku BMN gedung kantor Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu senilai Rp.2.0 Miliar (Register Transaksi Harian Penghapusan BBTN Lore Lindu, 2019). Informasi dari pengelola BMN BBTN Lore Lindu di sampaikan bahwa waktu yang dibutuhkan dalam penganggaran dan menyelesaikan pembangunan gedung kantor yang terdampak gempa Sulawesi Tengah tersebut adalah selama dua tahun. Dari kejadian tersebut menggambarkan bahwa besaran biaya pembangunan gedung baru kantor Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu akibat gempa Sulawesi Tengah lebih tinggi dibandingkan nilai buku dari gedungnya, serta kecepatan penyediaan anggaran dan pembangunan fisik gedung pasca bencana relatif lama.

Kemampuan pemerintah mengalokasikan dana untuk cadangan bencana setiap tahunnya senilai Rp.3.1 Triliun (USD 214 Juta), sedangkan kerugian akibat bencana Tahun 2004 akibat gempa dan tsunami Aceh sebesar Rp.51,4 Triliun (USD 3,5 Miliar), sehingga perlu waktu kurang lebih selama lima tahun untuk dapat memulihkan keadaan seperti semula. Pada rentang waktu Tahun 2000 sampai 2016, kerugian ekonomi yang dialami setiap tahunnya akibat bencana alam yakni rusaknya bangunan dan selain bangunan mencapai Rp.22.8 Triliun, sedangkan rata-rata dana darurat (*Contingency Fund*) bencana alam yang tersedia rentang Tahun 2005 sampai 2017 senilai Rp.3.1 Triliun, terdapat *gap* sebesar Rp.19.75 Triliun (BKF, 2018). Belajar dari pengalaman tersebut dan melihat kemampuan keuangan negara dalam mengatasi masalah bencana masih terdapat *gap* yang terlalu lebar, sehingga untuk mengcover pembangunan kembali bangunan pemerintah akibat *eksposur* bencana, perlu tindakan mitigasi risiko dalam bentuk Asuransi BMN, sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada negara lain atau

lembaga donor negara lain dalam penanganan bencana sehingga berdampak positif terhadap kesehatan keuangan negara.

Salah satu contoh Kementerian yang sudah merasakan manfaat dari Asuransi BMN adalah Kementerian Keuangan, klaim Asuransi BMN atas peristiwa bencana gempa di Mamuju Tahun 2020, banjir di Jakarta Tahun 2020, serta banjir dan longsor di Sorong Tahun 2022 mencapai Rp. 83,99 Miliar (Wildan, F.F., 2023). Hujan awal Tahun 2020 mengakibatkan banjir di beberapa wilayah, dampaknya beberapa gedung kantor Kementerian Keuangan yakni: Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cibitung, KPP Pratama Cibinong, KPP Pratama Bekasi Utara, KPP Pratama Bekasi Selatan, dan Balai Laboratorium Bea dan Cukai Tipe A Jakarta terdampak banjir (Sidik, S., 2020). Namun adapula gedung yang mengalami kejadian kebakaran pada tahun tersebut akan tetapi belum diasuransikan, yakni Gedung Kejaksaan Agung sehingga memaksa biaya renovasi dianggarkan pada tahun berikutnya (Putra, D.A., 2020). Dengan telah mengasuransikan gedung dan bangunan kantor, maka pembangunan kembali BMN tersebut akibat terdampak bencana tidak menguras Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara langsung serta lebih cepat penyediaan kebutuhan anggaran pembangunannya.

Pengamanan BMN merupakan salah satu bagian dari siklus pengelolaan BMN. Pengamanan BMN sendiri meliputi: administrasi, fisik dan hukum (Peraturan Pemerintah/PP No. 28 Tahun 2020). Pengamanan administrasi tidak hanya diartikan menyimpan dokumen kepemilikan berupa sertifikat tanah namun termasuk juga dokumen perolehan, dokumen pembayaran, serta Berita Acara (BA) Penilaian/Pengukuran terhadap BMN tersebut. Pengamanan fisik merupakan wujud dari mengamankan objek BMN tersebut, contohnya dengan membangun pagar/pembatas/patok atas BMN tanah yang masih kosong. Pengamanan hukum dilakukan dengan optimal di setiap tingkatan peradilan terhadap gugatan atas BMN. Asuransi BMN merupakan bentuk pengamanan BMN dalam artian pengamanan fisik yakni jika sewaktu-waktu gedung dan bangunan rusak berat akibat bencana alam sehingga tidak bisa digunakan dan tidak ekonomis jika diperbaiki, maka dilakukan renovasi gedung dan bangunan dengan pembiayaan dari Klaim Asuransi BMN gedung dan bangunan tersebut, sehingga secara waktu akan lebih cepat memperoleh anggaran untuk renovasi dan juga pelayanan publik

tidak berlarut-larut terganggu. Selama ini perencanaan penganggaran renovasi gedung dan bangunan dilakukan secara reguler melalui mekanisme RKA-K/L yang membutuhkan waktu lama serta terbatasnya alokasi anggaran pemerintah.

Cara pandang terhadap penanganan bencana terus berkembang dari paradigma konvensional, mitigasi, pembangunan, sampai dengan pengurangan risiko. Paradigma konvensional (*Relief and Emergency*) cenderung melihat bencana merupakan kejadian yang tidak bisa dielakkan sehingga korban harus segera mendapatkan pertolongan. Fokus dari penanggulangan bencana ini bersifat bantuan (*relief*) dan kedaruratan (*emergency*). Tujuan penanggulangan bencana ini adalah menekan tingkat kerugian, kerusakan serta percepatan pemulihan keadaan. Paradigma mitigasi bertujuan untuk mengidentifikasi daerah-daerah rawan bencana, memahami pola-pola yang dapat menimbulkan kerawanan, dan melakukan kegiatan struktural dan non struktural. Paradigma pembangunan merupakan bentuk upaya mengintegrasikan upaya-upaya penanggulangan bencana dalam bentuk program-program pembangunan seperti pengentasan kemiskinan, penggunaan teknologi dan penguatan ekonomi. Paradigma pengurangan risiko merupakan perpaduan sudut pandang teknis dan ilmiah dengan memperhatikan faktor-faktor sosial, ekonomi, dan politik untuk perencanaan pengurangan risiko bencana. Paradigma ini menempatkan masyarakat sebagai subjek, objek sekaligus sasaran utama upaya pengurangan risiko bencana dengan memasukkan unsur kearifan lokal dan pengetahuan tradisional dimasyarakat tersebut (Wibowo, M. 2010).

Indonesia telah menerapkan paradigma pengurangan risiko dengan Asuransi BMN, namun belum semua Kementerian/Lembaga melaksanakannya, seperti diungkapkan Sudarwan, E. (Said, A.A. 2021) bahwa sampai dengan Tahun 2021 masih terdapat tiga puluh tiga Kementerian/Lembaga yang belum mengasuransikan BMN gedung dan bangunannya. Kementerian/Lembaga yang telah mengasuransikan sejak paket peraturan pengasuransian BMN diterbitkan adalah sebagai berikut: diawali Kementerian Keuangan di Tahun 2019 yang merupakan proyek percontohan (*pilot project*) yang mengasuransikan BMN (Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No.253 Tahun 2019). Pada tahun selanjutnya bertambah menjadi tiga belas Kementerian/Lembaga yang mengasuransikan (KMK No.118 Tahun 2020 dan KMK No.265 Tahun 2020). Tabel

berikut menyajikan perkembangan jumlah Kementerian/Lembaga yang sudah mengasuransikan BMN sejak Tahun 2019 sampai 2021:

**Tabel 1.2**  
**Daftar Kementerian/Lembaga Telah Mengasuransikan BMN**  
**Tahun 2019 Sampai Dengan Tahun 2021**

<b>Tahun 2019</b>	<b>Tahun 2020</b>	<b>Tahun 2021</b>
1. Kementerian Keuangan	1. Kementerian Keuangan	1. Kementerian Keuangan
	2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)	2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
	3. Kementerian Perhubungan	3. Kementerian Perhubungan
	4. Kementerian Perdagangan	4. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
	5. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)	5. Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI
	6. Kementerian Pertahanan	6. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)
	7. Kementerian Sosial	7. Badan Pegawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
	8. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas)	8. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI
	9. Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI	9. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI
	10. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)	10. Kementerian ESDM
	11. Badan Pegawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)	11. Kementerian BUMN
	12. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI	12. Kementerian Parekraf
	13. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI	13. Kementerian Dalam Negeri
		14. Kementerian Pertahanan
		15. Kementerian Perindustrian
		16. Kementerian Kominfo
		17. Kementerian ATR/BPN
		18. Kementerian Koperasi dan UKM
		19. Kementerian Perdagangan
		20. Kementerian Kelautan dan Perikanan
		21. Kementerian PANRB
		22. Kementerian Ketenagakerjaan
		23. Kemendikbud
		24. Kemenko PMK
		25. Kemenkopolkhukam
		26. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
		27. Komisi Yudisial (KY)
		28. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
		29. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
		30. Badan Informasi Geospasial (BIG)
		31. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
		32. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam)
		33. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BP Sabang)
		34. Badan Intelijen Negara (BIN)
		35. Badan Keamanan Laut (Bakamla)
		36. Badan Nasional Narkotika (BNN)
		37. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI
		38. Badan SAR Nasional (Basarnas)
		39. Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)
		40. Badan Pusat Statistik (BPS)
		41. Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP)
		42. Badan Perlindungan Pekerja Migran (BP2MI)
		43. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten)
		44. Lembaga Administrasi Negara (LAN)
		45. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
		46. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI
		47. Kejaksaan Agung
		48. Arsip Nasional RI (ANRI)
		49. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
		50. Perpustakaan Nasional (Perpusnas)
		51. Ombudsman RI

Sumber: KMK No.253 Tahun 2019, KMK No.118 Tahun 2020, KMK No.265 Tahun 2020, dan Pratama, W.P. 2021.

KLHK mempunyai 275 satuan kerja dengan rincian: Eselon II-A: 84, II-B: 18, III-A: 168, dan IV-A: 5 yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sebaran Satuan Kerja Lingkup KLHK adalah sebagai berikut: yang berlokasi di pusat berjumlah 84 sedangkan yang berlokasi di daerah berjumlah 191. Tabel berikut merupakan gambaran ringkas sebaran Satuan Kerja KLHK berdasarkan eselonisasi:

**Tabel 1.3**  
**Sebaran Satuan Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan**

Eselon II-A		Eselon II-B		Eselon III-A		Eselon IV-A	
Pusat	84	Pusat	-	Pusat	-	Pusat	-
Daerah	-	Daerah	18	Daerah	168	Daerah	5
Jumlah	84	Jumlah	18	Jumlah	168	Jumlah	5

*Sumber:* Diolah dari Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) KLHK.

Selain itu, satuan kerja KLHK tersebar di seluruh provinsi di Indonesia yakni tiga puluh empat provinsi, empat puluh tiga kota, dan empat puluh delapan kabupaten. Berdasarkan peta indeks risiko bencana tingkat provinsi Tahun 2021 dan Tahun 2022 BNPB, sebaran satuan kerja KLHK yang masuk dalam kelas risiko bencana tinggi, sedang, dan rendah dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.4**  
**Sebaran Satuan Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Berdasarkan Kelas Risiko Bencana**

Sebaran Satuan Kerja KLHK	Kelas Risiko		
	Tinggi	Sedang	Rendah
<b>Provinsi</b>	15	18	1
<b>Satuan Kerja</b>	74	129	72

*Sumber:* Diolah dari Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2021 dan 2022 BNPB.

Tabel di atas menunjukkan bahwa tujuh puluh empat satuan kerja KLHK berada pada kelas risiko tinggi yang tersebar pada lima belas provinsi, seratus dua puluh sembilan satuan kerja berada pada kelas risiko sedang yang tersebar pada delapan belas provinsi, sedangkan tujuh puluh dua satuan kerja berada pada kelas risiko rendah tersebar pada satu provinsi.

KLHK pada Tahun 2022 dan 2023 telah mengasuransikan sejumlah dua gedung dan bangunannya yakni Gedung Arsip Cimanggis dan Gedung Salemba yang tercatat dalam daftar Aset Biro Umum, Sekretariat Jenderal, KLHK seperti pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1.5**  
**Rincian Objek Pertanggungans Poliss Asuransi BMN Kementerian**  
**Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022 dan 2023**

No.	Kode Barang	Nama Barang	NUP	Lokasi	Penggunaan dan Fungsi BMN	Kode Pos	Tahun Bangun	Harga Pertanggungans (Rp.)
1	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	13	Jl. Raya Jakarta-Bogor No.Km 37,2, Jatijajar, Kec. Tapos, Kota Depok	GEDUNG ARSIP	16451	2013	2.207.869.951
2	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	8	Jl. Salemba Raya No.100	Kantor	10440	2000	2.229.132.970
<b>TOTAL HARGA PERTANGGUGAN</b>								<b>4.437.002.921</b>

No	Jenis BMN	Kode Satker	Kode Barang	NUP	Okupasi	Kode Okupasi	Tahun Bangun	Alamat / Lokasi Objek, Pertanggungans	Kode Pos	Kelas Konstruksi	Jumlah Lantai	Harga Pertanggungans (Rp)
1	Gedung Kantor	029010199465003001KP	4010101001	13	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2971	2013	Jl. Raya Jakarta-Bogor No.Km 37,2, Jatijajar, Kec. Tapos, Kota Depok	16451	1	<9	2.207.869.951
2	Gedung Kantor	029010199465003001KP	4010101001	8	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2971	2000	Jl. Salemba Raya No.100	10440	1	<9	2.229.132.970
TOTAL												4.437.002.921

*Sumber: Asuransi Jasindo, 2022 dan 2023.*

Namun dari Kementerian Keuangan belum ada rilis resmi mengenai daftar Kementerian/Lembaga yang sudah mengasuransikan BMN periode Tahun 2022 dan 2023. Anggaran belanja asuransi gedung dan bangunan Tahun 2022 tersebut senilai Rp.8.760.000. dan dianggarkan dengan nilai yang sama pada Tahun 2023 (Rincian Kertas Kerja Satker Sekretariat Jenderal KLHK Tahun 2022 dan 2023). Harga pertanggungans polis Asuransi BMN Tahun 2023 tersebut sebesar Rp.437.002.921. (Asuransi Jasindo, 2023). Secara keseluruhan, nilai gedung dan bangunan KLHK dalam neraca Laporan Keuangan (LK) KLHK Tahun 2021 sebesar Rp.3.895.519.488.811. dan pada Tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi Rp.4.056.368.562.738. Berikut tabel neraca aset tetap KLHK Tahun 2021 dan 2022:

**Tabel 1.6**  
**Neraca Aset Tetap Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan**  
**Tahun 2021 dan 2022**

<i>(dalam rupiah)</i>				
Jenis Aset	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ Penurunan	%
Tanah	10.002.886.232.495	9.993.102.760.376	9.783.472.119	0,10
Peralatan dan Mesin	3.332.938.107.800	3.572.287.591.378	(239.349.483.578)	(6,70)
Gedung dan Bangunan	4.056.368.562.738	3.895.519.488.811	160.849.073.927	4,13
Jalan, irigasi dan Jaringan	550.023.794.958	525.979.806.667	24.043.988.291	4,57
Aset Tetap Lainnya	63.254.576.108	59.197.990.564	4.056.585.544	6,85
Konstruksi Dalam Pengerjaan	52.699.740.929	92.321.203.995	(39.621.463.066)	(42,92)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(3.510.385.288.123)	(3.525.189.222.747)	14.803.934.624	(0,42)
<b>Jumlah Aset Tetap</b>	<b>14.547.785.726.905</b>	<b>14.613.219.619.044</b>	<b>(65.433.892.139)</b>	<b>(0,45)</b>

*Sumber:* LK KLHK Tahun 2022.

Rincian saldo BMN gedung dan bangunan setiap Eselon I pada KLHK disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 1.7**  
**Rincian Gedung dan Bangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan**  
**Kehutanan Tahun 2021 dan 2022**

Kd Es.1	Eselon I	Saldo per		Kenaikan (Penurunan)	%
		31 Des 2022	31 Des 2021		
029.01	Setjen	744.250.763.856	740.317.024.735	3.933.739.121	0,53
029.03	Ditjen PHL	59.914.116.824	60.074.116.824	(160.000.000)	(0,27)
029.04	Ditjen PDASRH	559.430.638.601	537.461.736.266	21.968.902.335	4,09
029.05	Ditjen KSDAE	1.625.468.362.905	1.518.937.702.657	106.530.660.248	7,01
029.06	Ditjen PKTL	128.253.784.513	128.964.100.755	(710.316.242)	(0,55)
029.07	BSI LHK	376.504.066.307	377.155.224.154	(651.157.847)	(0,17)
029.08	BP2SDM	404.607.067.932	368.796.638.903	35.810.429.029	9,71
029.09	Ditjen PSKL	25.574.441.931	26.821.720.281	(1.247.278.350)	(4,65)
029.10	Ditjen PHLHK	56.223.957.644	61.403.397.309	(5.179.439.665)	(8,44)
029.11	Ditjen PPI	74.097.261.275	73.543.725.977	553.535.298	0,75
029.13	Ditjen PPKL	2.044.100.950	2.044.100.950	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>4.056.368.562.738</b>	<b>3.895.519.488.811</b>	<b>160.849.073.927</b>	<b>4,13</b>

*Sumber:* LK KLHK Tahun 2022.

Dari Tabel 1.6 di atas, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) memiliki saldo BMN gedung dan bangunan paling besar dibandingkan Eselon 1 yang lain dengan nilai rupiah Rp.1.625.468.362.905. menyusul berikutnya Sekretariat Jenderal Rp.744.250.763.856. dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH) sebesar Rp.559.430.638.601. Direktorat Jenderal KSDAE memiliki satuan kerja yang berlokasi di daerah sejumlah 74, sedangkan Direktorat Jenderal PDASRH

memiliki 155 satuan kerja yang berlokasi di daerah. Total gedung dan bangunan KLHK senilai Rp.4 Triliun lebih, jika diasuransikan sekaligus tentunya akan memerlukan anggaran yang besar pula. Apakah alasan tersebut termasuk yang menjadikan belum seluruh satuan kerja lingkup KLHK mengasuransikan gedung dan bangunannya ?, atau ada pertimbangan lain mengapa sebagian besar satuan kerja lingkup KLHK belum menganggarkan untuk Asuransi BMN khususnya gedung dan bangunan. Untuk itu dalam Asuransi BMN dilakukan prinsip: efektif, efisien, selektif, dan prioritas dengan memperhatikan ketersediaan keuangan negara sehingga terhindar dari kerugian dan inefektivitas keuangan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian dilakukan guna menggali faktor-faktor tingkat pengamanan BMN melalui Asuransi BMN di KLHK dan selanjutnya dapat merumuskan upaya meningkatkan pengamanan BMN melalui Asuransi BMN pada KLHK. Berdasarkan penjabaran permasalahan di atas, peneliti mengambil judul tesis '**Pengamanan Barang Milik Negara Melalui Asuransi Pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan**'.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan informasi dan telaah dokumen awal seperti pada latar belakang permasalahan di atas, identifikasi masalahnya adalah:

1. Terdapat kesenjangan biaya pembangunan kembali gedung dan bangunan pasca bencana.
2. Lamanya waktu penganggaran renovasi gedung dan bangunan pasca bencana alam melalui skema RKA-K/L.
3. Jumlah BMN gedung dan bangunan yang diasuransikan pada KLHK jumlahnya sedikit.

## **C. Rumusan Permasalahan**

1. Mengapa pengamanan BMN gedung dan bangunan melalui Asuransi BMN pada KLHK rendah ?.
2. Bagaimana model meningkatkan pengamanan BMN gedung dan bangunan melalui Asuransi BMN di KLHK ?.

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a) untuk menggali faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya pengamanan BMN gedung dan bangunan melalui Asuransi BMN pada KLHK.
- b) untuk merumuskan model pengamanan BMN gedung dan bangunan melalui Asuransi pada KLHK.

### **2. Manfaat Penelitian**

#### **Manfaat Akademik**

Hasil dari penelitian dapat memperkaya wawasan, pengetahuan, dan pemahaman secara umum pada bidang Administrasi Pembangunan Negara, khususnya Manajemen Aset, serta memberikan informasi terkait teori dan metodologi yang digunakan dalam penelitian, sehingga harapannya akan ada penelitian-penelitian lebih lanjut yang lebih komprehensif mengenai pengelolaan BMN khususnya pengamanan BMN gedung dan bangunan melalui Asuransi BMN dikaitkan dengan penganggaran serta manajemen risiko dan kebencanaan.

#### **Manfaat Praktis**

Memberikan gambaran/masukan mengenai model yang dapat diterapkan untuk meningkatkan pengamanan BMN melalui pengasuransian BMN gedung dan bangunan bagi Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang di KLHK.

**POLITEKNIK  
STIA LAN  
J A K A R T A**

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penyajian data dan analisis data pada BAB IV menunjukkan bahwa faktor kelembagaan, budaya, keterjangkauan, kesadaran dan pengetahuan, serta faktor proses pengasuransian dan kepercayaan menyebabkan rendahnya tingkat pengamanan BMN melalui asuransi. Adapun kesimpulan secara rinci adalah sebagai berikut:

- 1) Rendahnya tingkat pengamanan BMN melalui asuransi pada KLHK disebabkan oleh:
  - a) faktor kelembagaan menunjukkan bahwa: (1) belum semua Satuan Kerja lingkup KLHK mengetahui Surat Kepala Biro Umum Nomor S.301/ROUM/PLP/KAP.3/2/2021 tanggal 26 Februari 2021 perihal Pengasuransian BMN Tahun Anggaran 2021. (2) Pengasuransian BMN belum menjadi Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) evaluasi BMN oleh Inspektorat Jenderal KLHK.
  - b) faktor budaya menunjukkan walaupun beberapa gedung dan bangunan Satuan Kerja KLHK berada pada Indeks Risiko Bencana kategori tinggi serta pernah terjadi bencana alam, belum menjadi pendorong untuk mengamankannya melalui Asuransi BMN.
  - c) faktor keterjangkauan menunjukkan bahwa: (1) anggaran Asuransi BMN masih terbatas pada dua gedung milik Biro Umum.
  - d) faktor kesadaran dan pengetahuan menunjukkan bahwa: (1) Asuransi BMN belum sepenuhnya dipahami oleh seluruh Satuan Kerja lingkup KLHK. (2) Pendidikan dan pelatihan mengenai pengasuransian BMN belum pernah dilakukan oleh Biro Umum Sekretariat Jenderal KLHK. (3) Belum adanya sistem saluran guna Satuan Kerja lingkup KLHK melaporkan BMN yang terdampak bencana alam kepada Biro Umum Sekretariat Jenderal KLHK. (4) Belum adanya peta prioritas BMN gedung dan bangunan KLHK untuk diasuransikan.
  - e) faktor proses pengasuransian dan kepercayaan menunjukkan bahwa: (1) belum dilaksanakannya sosialisasi mengenai Asuransi BMN oleh perusahaan asuransi Jasindo kepada seluruh Satuan Kerja lingkup KLHK.

2) Berdasarkan hasil penelitian ditemukan permasalahan dalam pengamanan BMN melalui Asuransi BMN pada KLHK. Selanjutnya untuk menjawab permasalahan tersebut disusunlah model guna dapat meningkatkan pengamanan BMN melalui Asuransi BMN pada KLHK dengan menambahkan satu tahapan dalam pelaksanaan pengasuransian BMN yakni tahap membangun komitmen yang merupakan landasan awal yang diperlukan dalam pengasuransian BMN di KLHK. Tahap membangun komitmen merupakan tahap awal pengasuransian BMN sebelum tahap perencanaan, tahap pelaksanaan (tahap penganggaran, tahap pengadaan, tahap klaim), tahap pelaporan, tahap pemeliharaan dan pengamanan, tahap penatausahaan, dan tahap penghapusan. Dalam membangun komitmen tidak saja dilakukan oleh pemimpin-pemimpin organisasi lingkup KLHK, namun pengelola BMN Satuan Kerja lingkup KLHK perlu dilibatkan, sehingga komitmen yang sudah dibangun tersebut juga sampai kepada pengelola BMN seluruh Satuan Kerja di KLHK.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, diperlukan upaya untuk meningkatkan pengamanan BMN melalui asuransi pada KLHK. Untuk itu penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Saran untuk meningkatkan pengamanan BMN melalui Asuransi pada KLHK:
  - a) faktor kelembagaan: (1) Biro Umum Sekretariat Jenderal KLHK membuat kembali surat perihal pengasuransian BMN dengan merujuk pada surat sebelumnya dan ditujukan kepada seluruh Satuan Kerja lingkup KLHK dengan lampiran berupa SOP/proses bisnis perencanaan dan penganggaran pengasuransian BMN. (2) Inspektorat Jenderal KLHK memasukkan evaluasi Asuransi BMN dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).
  - b) faktor budaya: (1) setiap Satuan Kerja lingkup KLHK didampingi Biro Umum dan Inspektorat Jenderal KLHK melakukan identifikasi potensi atau kerawanan bencana pada setiap lokasi gedung dan bangunan berada. (2) Setiap gedung dan bangunan Satuan Kerja lingkup KLHK yang terdampak

bencana, riwayat kebencanaan tersebut didokumentasikan dan direkapitulasi dengan baik oleh Setiap Satuan Kerja KLHK.

- c) faktor keterjangkauan: Biro Umum Sekretariat Jenderal KLHK sebagai Pengguna Barang membuat sketsa perhitungan Premi Asuransi BMN untuk setiap gedung dan bangunan lingkup KLHK berdasarkan database aplikasi SAKTI/SIMAN untuk kemudian hasilnya disampaikan ke seluruh Satuan Kerja lingkup KLHK.
  - d) faktor kesadaran dan pengetahuan: (1) Biro Umum Sekretariat Jenderal KLHK perlu melakukan sosialisasi dengan nara sumber dari BKF Kementerian Keuangan serta BNPB. (2) Biro Umum Sekretariat Jenderal KLHK perlu melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan Asuransi BMN untuk seluruh Satuan Kerja lingkup KLHK. (3) Biro Umum Sekretariat Jenderal KLHK diharapkan membuat sistem saluran guna melaporkan BMN yang terdampak bencana alam oleh Satuan Kerja lingkup KLHK. (4) Biro Umum Sekretariat Jenderal KLHK perlu membuat peta prioritas BMN gedung dan bangunan untuk diasuransikan.
  - e) faktor pengasuransian dan kepercayaan: (1) Biro Umum bersama Perusahaan Asuransi Jasindo perlu melakukan sosialisasi pengasuransian BMN kepada seluruh Satuan Kerja lingkup KLHK.
- 2) Terkait manfaat praktis penelitian berupa model yang dapat diterapkan untuk meningkatkan pengamanan BMN melalui Asuransi pada KLHK, peneliti menyarankan perlunya penelitian lanjutan guna melakukan validasi model kepada unit kerja KLHK yang berwenang dan bertanggungjawab tentang pengasuransian BMN lingkup KLHK yakni Biro Umum serta Inspektorat Jenderal KLHK selaku pengawas internal KLHK untuk mendapatkan tanggapan terhadap model yang sudah dihasilkan peneliti.

## DAFTAR PUSTAKA

- 'Aliimah, F. 2020. *Analisis Yuridis Pengasuransian Barang Milik Negara*. Tesis tidak diterbitkan. Yogyakarta: Program Studi Hukum, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia.
- Adhasara, A. et.al. 2022. "Disaster Risk Financing And Insurance: How Far Have We Known ?". *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan*, 26, (1), 76-95. doi: <https://doi.org/10.26593/be.v26i1.5534.76-95>
- Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. 2018. *Strategi Pembiayaan dan Asuransi Risiko Bencana*. Jakarta: Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan.
- Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. *Pembiayaan dan Asuransi Risiko Bencana (PARB)*. Online. (<https://fiskal.kemenkeu.go.id/strategi-drifi/seadrif>). Diakses 22 Januari 2024.
- Badan Pemeriksa Keuangan. 2021. *Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020*.
- Badan Pemeriksa Keuangan. 2022. *Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021*.
- Badan Pemeriksa Keuangan. 2023. *Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022*.
- Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu. 2019. *Register Transaksi Harian KDP*.
- Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu. 2019. *Register Transaksi Harian Penghapusan*.
- Barnard, I. (n.d.). "Asset Management – An Insurance Perspective". *Engineering Asset Management*. doi: 10.1007/978-1-84628-814-2\_3

Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2021. *Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun 2021 Audited Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Booth, K. 2018. "Profittering from Disaster: Why Planners Need to be paying More Attention to Insurance. *Journals Planning Practice & Research* Taylor & Francis Online, 33, (2), 211-227. doi: <https://doi.org/10.1080/02697459.2018.1430458>

Controller and Auditor General. 2013. *Insuring public assets*. Online. (<https://oag.parliament.nz/2013/insuring-public-assets>). Diakses 21 Januari 2024.

Gina, F.V. 2022. *Mengenal Apa Itu Ring of Fire, Penyebab Indonesia Sering Dilanda Gempa dan Letusan Gunung Berapi*. Online (<https://bobo.grid.id/read/083604466/mengenal-apa-itu-ring-of-fire-penyebab-indonesia-sering-dilanda-gempa-dan-letusan-gunung-berapi?page=all>). Diakses 14 Agustus 2023.

Global Facility for Disaster Reduction and Recovery (GFDRR) and The World Bank. 2011. *Indonesia: Advancing a National Disaster Risk Financing Strategy-Option for Consideration*. Washington DC: Global Facility for Disaster Reduction and Recovery/GFDRR and The World Bank.

Hasting, N.A.J. 2020. *Physical Asset Management. With an Introduction to the ISO 55000 Series of Standards*. Brisbane: Springer.

Hilft, B.E. 2023. *World Risk Report 2023. Focus: Diversity*. Berlin: Bundnis Entwicklung Hilft.

Hilft, B.E. 2022. *World Risk Report 2022. Focus: Digitalization*. Berlin: Bundnis Entwicklung Hilft.

Inarto, K. 2019. *Perkembangan Pengadaan Asuransi Untuk Barang Milik Negara*. Online. (<https://bppk.kemenkeu.go.id/balai-diklat-keuangan-denpasar/artikel/perkembangan-pengadaan-asuransi-untuk-barang-milik-negara-350284>). Diakses 17 Desember 2023.

Indradi, S.S. 2016. *Dasar-Dasar Dan Teori Administrasi Publik*. Malang: Intrans Publishing.

Keban, Y.T. 2014. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2023. *LKPP Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2022 Audited*. Jakarta: Kementerian Keuangan.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 280/KM.6/2019 Tentang *Tahapan Pelaksanaan Pengadaan Jasa Asuransi Barang Milik Negara Pada Kementerian/Lembaga*.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/KM.6/2020 Tentang *Tahapan Pelaksanaan Pengasuransian Pada Kementerian/Lembaga*.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 265/KM.6/2020 Tentang *Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 118/KM.6/2020 Tentang Tahapan Pelaksanaan Pengasuransian Barang Milik Negara Pada Kementerian/Lembaga*.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 253/KM.6/2019 Tentang *Tahapan Pelaksanaan Pengasuransian Pada Kementerian/Lembaga Tahun 2019*.

Komite Standar Akuntansi Pemerintah. 2022. Tentang *Standar Akuntansi Pemerintah Republik Indonesia*.

Kousky, C. dan Kunreuther, H. 2017. *Defining the Roles of the Public and Private Sector in Risk Communication, Risk Reduction, and Risk Transfer*. Online. ([https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=3029630](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3029630)). Diakses 20 Januari 2024.

Melli dan Yudi. 2014. *Pengelolaan Dana Asuransi Pemerintah Ala Australia*. Online. (<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita/baca/6797/Pengelolaan-Dana-Asuransi-Pemerintah-Ala-Australia.html>). Diakses 21 Januari 2024.

Mulyadi, D. 2016. *Administrasi Publik Untuk Pelayanan Publik: Konsep & Praktik Administrasi Publik dalam Penyusunan SOP, Standar Pelayanan, Etika Pelayanan, Inovasi untuk Kinerja Organisasi*. Bandung: Alfabeta.

Nigro, F.A. dan Nigor, L.G. 1989. *Administrasi Publik Modern*. Terjemahan oleh Yudi Santoso, Yogyakarta: PalMall.

Nugroho, S.P. 2018. *1.999 Kejadian Bencana Selama Tahun 2018, Ribuan Korban Meninggal Dunia*. Online. (<https://bnpb.go.id/berita/1999-kejadian-bencana-selama-tahun-2018-ribuan-korban-meninggal-dunia#:~:text=Selama%20tahun%202018%20ini%2C%20bencana,17%2C%20dan%20tsunami%201%20kali>). Diakses 14 Agustus 2023.

Pasolong, H. 2017. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 Tentang *Penatausahaan Barang Milik Negara*.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.06/2016 Tentang *Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan Dan Penghapusan Barang Milik Negara*.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 97/PMK.06/2019 Tentang *Pengasuransian Barang Milik Negara*.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 Tentang *Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan*.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang *Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024*.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 247/PMK.06/2016 Tentang *Pengasuransian Barang Milik Negara*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang *Standar Akuntansi Pemerintah*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang *Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang *Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.*

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2020 Tentang *Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan.*

PT. Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) Nomor: 201.235.110.22.00033/000/000 Tentang Polis Asuransi Barang Milik Negara (Asuransi BMN) Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022.

PT. Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) Nomor: 204.235.110.23.00011/000/000 Tentang Polis Asuransi Barang Milik Negara (Asuransi BMN) Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023.

PT. Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) Nomor: 204.235.110.24.00039/000/000 Tentang Polis Asuransi Barang Milik Negara (Asuransi BMN) Mahkamah Agung RI.

Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB. 2023. *RBI Risiko Bencana Indonesia: Memahami Risiko Sistemik di Indonesia.* Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Purwati, Sri. 2021. *Asuransi BMN, Perlukah ? (Seri Pertama).* Online. (<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-yogyakarta/baca-artikel/14032/Asuransi-BMN-Perlukah-Seri-Pertama.html>). Diakses 04 Januari 2023.

Putra, D.A. 2020. *Tak Diasuransikan, Renovasi Gedung Kejagung Gunakan APBN 2021.* Online. ([https://www.liputan6.com/amp/4339013/tak-diasuransikan-renovasi-gedung-kejagung-gunakan-apbn-2021#amp\\_tf=Dari%20%251%24s&aoh=17084315538054&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com](https://www.liputan6.com/amp/4339013/tak-diasuransikan-renovasi-gedung-kejagung-gunakan-apbn-2021#amp_tf=Dari%20%251%24s&aoh=17084315538054&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com)). Diakses 20 Februari 2024.

Pratama, W.P. 2021. *Ini Daftar K/L yang Sudah Terproteksi Asuransi Barang Milik Negara.* Online. (<https://finansial.bisnis.com/read/20210910/215/1440866/ini->

[daftar-kl-yang-sudah-terproteksi-asuransi-barang-milik-negara](#)). Diakses 09 Desember 2023.

Rafsanjani, L.H. et.al. 2022. "Membangun Model Pengelolaan Bangunan Gedung Pada Barang Milik Negara Berbasis Asuransi All Risk Di Ibu Kota Nusantara". *Jurnal Legal Reasoning*, 5, (1), 21-22. doi: <https://doi.org/10.35814/jlr.v5i1.4384>

Said, A.A. 2021. 33 Kementerian dan Lembaga Belum Asuransikan Barang Milik Negara. Online. (<https://katadata.co.id/desysetyowati/finansial/613b3f6549a02/33-kementerian-dan-lembaga-belum-asuransikan-barang-milik-negara>). Diakses 14 Agustus 2023.

Satuan Tugas Pelaksana Penanggulangan Bencana Sulawesi Tengah. Satuan Tugas Penanggulangan Bencana. 2018. *Assessment Singkat Gedung Kantor di Wilayah Terdampak Gempa Provinsi Sulawesi Tengah*. Palu: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2023. *Rincian Kertas Kerja Satuan Kerja Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2022. *Rincian Kertas Kerja Satuan Kerja Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Sidik, S., 2020. 5 Gedung Kemenkeu Kebanjiran, Klaim Asuransi Rp 50 M. Online. (<https://www.cnbcindonesia.com/news/20200110161058-4-129203-5-gedung-kemenkeu-kebanjiran-klaim-asuransi-rp-50-m>). Diakses 18 Februari 2024.

Siregar, D.D. 2016. *Otonomi Dan Pengelolaan Aset Daerah*. Jakarta: Sinergi Manajemen Aset (SIMA) dan Yayasan Pendidikan Penilai Indonesia (YAPPI).

Soetanto, R. et.al. 2020. "Developing sustainable arrangements for "proactive" disaster risk financing in Java, Indonesia". *International Journal of Disaster Resilience in the Built Environmet*, 28, (11), 435-451. doi: [10.1108/IJDRBE-01-2020-0006](https://doi.org/10.1108/IJDRBE-01-2020-0006)

Sugiama, A.G. 2016. *Manajemen Aset Pariwisata: Pelayanan Berkualitas Agar Wisatawan Puas dan Loyal*. Bandung: Guardaya Intimarta.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suwanda, D. 2015. *Optimalisasi Pengelolaan Aset Pemda*. Jakarta: PPM Manajemen.

Surat Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Pemali Jratun Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.173/BPDASHL.PJ/TU/KAP.3/4/2021 Tentang *Pengasuransian Barang Milik Negara Tahun 2021*.

Surat Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.301/ROUM/PLP/KOP.2/2/2021 Tentang *Pengasuransian BMN Tahun Anggaran 2021*.

Surat Sekretarias Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.417/SET/KU/KAP.0/3/2021 Tentang *Pengasuransian BMN Tahun Anggaran 2021*.

Tjandra, R. 2014. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Grasindo.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang *Keuangan Negara*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang *Perbendaharaan Negara*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang *Perasuransian*.

Wibowo, M. 2010. *Strategi Mitigasi Untuk Mengatasi Penyakit Akibat Sanitasi Lingkungan Yang Buruk: Paradigma Baru Mitigasi Bencana*. Jurnal Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Jakarta: Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.

Wildan, F.F. 2023. *Wow! Klaim Asuransi Barang Milik Negara Tembus Rp 83,99 M*. Online. ([https://www.djkn.kemkeu.go.id/berita\\_meida/baca/13269/Wow-klaim-Asuransi-Barang-Milik-Negara-Tembus-Rp-8399-M.html](https://www.djkn.kemkeu.go.id/berita_meida/baca/13269/Wow-klaim-Asuransi-Barang-Milik-Negara-Tembus-Rp-8399-M.html)). Diakses 18 Februari 2024.



POLITEKNIK  
STIALAN  
JAKARTA